

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kebijakan Pemerintah Jepang di Indramayu meliputi penghapusan simbol dan kelembagaan warisan kolonial Belanda *de-westernisasi*, restrukturisasi birokrasi desa ke dalam sistem komando militer, pembentukan lembaga kontrol produksi pertanian seperti *Nougyo Kumiai*, penerapan sistem setor wajib hasil panen ke *kyōsei chotatsu*, serta mobilisasi tenaga kerja paksa *romusha*. Seluruh kebijakan ini dirancang secara terpusat dari Tokyo hingga diturunkan ke level desa melalui hierarki *syu, ken, gun, son*, hingga *ku*. Implementasi kebijakan Jepang di Kaplongan berlangsung melalui kooptasi terhadap pemimpin formal desa (Kuwu) yang dipaksa menjadi instrumen pengumpulan hasil panen, sehingga mengubah posisi mereka dari mediator kepentingan masyarakat menjadi kepanjangan tangan kekuasaan militer Jepang. Implementasi ini juga ditandai oleh penurunan produktivitas pertanian secara bertahap akibat hilangnya insentif petani, terbatasnya sarana produksi, serta berkurangnya tenaga kerja produktif yang dimobilisasi sebagai *romusha*. Ketika kuota penyerahan tidak tercapai, Jepang justru memperketat kebijakan hingga menyisakan jatah minimum bagi setiap kepala keluarga.

Dampak sosial-ekonomi yang muncul di Indramayu antara lain: melemahnya sistem patron-klien tradisional yang sebelumnya menjadi penopang sosial petani kecil; munculnya krisis kepemimpinan akibat tokoh-tokoh desa yang dikooptasi oleh

kekuasaan formal, terganggunya struktur sosial dan demografi desa karena mobilisasi romusha yang memaksa perempuan, anak-anak, dan lansia menanggung beban pekerjaan pertanian, serta tekanan ekonomi yang melampaui batas minimum kebutuhan hidup petani, yang memicu kemarahan kolektif. Akumulasi berbagai tekanan struktural tersebut diperkuat oleh kehadiran tokoh karismatik seperti Kiai Arsyad serta sikap penolakan Haji Aksan terhadap kewajiban penyerahan padi pada akhirnya memicu perlawanan petani di Kaplongan (April 1944) dan Cidempet, Indramayu (Mei 1944), yang kemudian diikuti pula oleh perlawanan serupa di sejumlah desa lain.

2. Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelusuran sumber primer yang lebih luas, khususnya arsip-arsip pemerintahan Jepang *Gunseikanbu* dan dokumen Belanda pasca-pendudukan (NIMH, NEFIS), guna memperkaya data kuantitatif mengenai volume produksi dan penyerahan padi di Indramayu secara lebih terukur.

Bagi civitas akademika UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan awal bagi pengembangan kajian.

Bagi pemerintah daerah dan instansi kebudayaan setempat, disarankan agar peristiwa sejarah Indramayu didokumentasikan

secara resmi, misalnya melalui penanda sejarah (monumen atau prasasti) atau materi pembelajaran sejarah lokal, sebagai upaya pelestarian memori kolektif masyarakat dan sejarah lokal Indramayu yang masih minim literatur, khususnya kajian berbasis *microhistory* di tingkat desa.

